

**DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA  
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN *SYIQAQ* DI  
PENGADILAN AGAMA**

**DISERTASI**

Oleh :

**Ahmad Farhat  
NIM: 170311020016**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2024**

**DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA  
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN *SYIQAQ* DI  
PENGADILAN AGAMA**

**DISERTASI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Doktor (S3)  
Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**Ahmad Farhat  
NIM: 17.0311.0200.16**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farhat  
NIM : 170311020016  
Tempat/Tgl Lahir : Banjar, 26 September 1971  
Program Studi : S3 Ilmu Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul “Dekonstruksi Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan *Syiqaq* di Pengadilan Agama” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil palgiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,  
  
Ahmad Farhat

SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
KEMENTERIAN KEPELUKUTAN  
60F03ALX265888174

**Halaman Persetujuan**  
**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR**  
Judul Deisertasi  
**DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT  
DENGAN ALASAN *SYIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Ahmad Farhat**


**NIM: 170311020016**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk  
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum**  
Tanggal, **Agustus 2024**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H.A. Sukris Sarmadi, MH.**  
Tanggal, **Agustus 2024**

**PENGESAHAN DISERTASI**

**Judul Desertasi**

**DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT  
DENGAN ALASAN *SYIQA'Q* DI PENGADILAN AGAMA**

**Yang dipersembahkan dan disusun oleh:**

**Ahmad Farhat**

**NIM: 170311020016**

**Telah Diajukan pada Dewan Penguji**

**Pada Hari Jumat, Tanggal 23 Agustus 2024**

**Dinyatakan LULUS dengan Predikat : SANGAT MEMUASKAN**

**Dewan Penguji :**

1. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.,  
(Ketua/Penguji)
2. Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.,  
(Anggota/Penguji Utama)
3. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan MH., M.Hum.  
(Anggota/Penguji)
4. Mujiburohman, MA., Ph.D.  
(Anggota/Penguji)
5. Dr. H.A. Sukris Sarmadi, M.H.  
(Anggota/Penguji)
6. Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  
(Anggota/Penguji)

Tanda tangan



Mengetahui,  
Direktur

Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.,  
NIP. 197105251997031006

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **“DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN *SYIQA’Q* DI PENGADILAN AGAMA”**. Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk diajukan kepada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (S3) program studi Ilmu Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan serta pengalaman Penulis. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis menghaturkan permohonan maaf atas segala kekurangan tersebut dan mohon koreksi yang bersifat membangun serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang diberikan kepada penulis.
3. Mujiburohman, MA., Ph.D. dan Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc, MA., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas

Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

4. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku pembimbing I dan Dr. H.A. Sukris Sarmadi, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini sehingga penulis mendapatkan kemudahan.
5. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan MH., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini.
6. Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. selaku Penguji Eksternal yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini sehingga penulis mendapatkan kemudahan.
7. Para Dosen S3 Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Ayahanda almahum H. M. Saleh Abdulrahim dan ibunda Hj. Mahmudah yang penuh dengan kasih sayang mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan untuk keberhasilan penulis baik dalam hidup maupun dalam akademis.
9. Isteri tercinta Hj. Siti Fadiah, S.Ag., M.H. anak-anak Penulis Shofwan Muhammady, Ahmad Fuadiy Fakhruddin dan Muhammad Fadhil Muzakki, yang selalu memotivasi dan menjadi inspirasi bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu hingga selesai penulisan disertasi ini.

Dan akhirnya penulis berharap, agar kiranya karya tulis ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan menjadi wakaf akademik bagi kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Banjarmasin, Agustus 2024  
Penulis,

Ahmad Farhat



## ABSTRAK

**Ahmad Farhat**, NIM : 1703110220016 *DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQĀQ DI PENGADILAN AGAMA*, di bawah bimbingan Promotor : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Co Promotor : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. pada Pasca Sarjana S3 UIN Antasari Banjarmasin 2024.

Kata kunci : *Penyelesaian Perkara Syiqāq, Gugat Gugat di Pengadilan Agama*

Disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan menelaah dan mempelajari sejumlah bahan hukum atau dokumen hukum berupa putusan pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab, tulisan ilmiah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini beranjak dari ketidaksinkronan aturan yang mengatur persoalan *syiqāq* dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, ketidaksinkronan pengaturan tersebut berpengaruh terhadap praktek penanganan perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*/pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI ditentukan, salah satu alasan perceraian adalah “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan perceraian inilah yang kemudian secara sederhana dipahami sebagai *syiqāq* dalam hukum Islam, yang kemudian dalam penanganan perkaranya diterapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

terhadap ketentuan ini dalam prakteknya relatif tidak ada problem. Namun kemudian dalam perjalanan lebih lanjut berkembanglah pendapat yang pada intinya “memisahkan” antara *syiqāq* dengan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, pendapat ini kemudian dilegitimasi ke dalam Prdoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin/Buku II) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/032/SK/IV/2006 pada huruf b ditentukan sebagai berikut : “Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*”.

Secara teoritik dan praktek pengaturan dalam Buku II huruf b yang memisahkan antara pertengkaran terus menerus dengan *syiqāq* tersebut sarat dengan probelematika hukum. Dalam tinjauan berbagai pendekatan dan teori analisis, yaitu melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dan fiqih, melalui teori *mashlahat*, teori *maqashid syariah* dan teori sinkronisasi hukum, pemisahan tersebut tidak tepat dan berakibat kepada ketidaksinkronan dalam praktek hukum penanganan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Karena itu dalam rangka memberikan solusi atas problematika hukum tersebut ketentuan dalam Buku II huruf b tersebut harus ditinjau ulang dan dilakukan dekonstruksi hukum.

## ABSTRACT

**Ahmad Farhat** : *"Reconstruction of Divorce Settlement with the Principles of the Syiqāq in Religious Court"* " under supervision of : Advisor I : Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum. and advisor II : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. Dissertation, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin 2024.

Keywords : Settlement of the Syiqāq in Religious Court.

This dissertation was a normative legal research, this research is conducted by examining and studying several legal materials or legal documents in the form of religious court decisions, laws, books, scientific writings and literature related to the subject being studied.

This study went from the unsynchronized regulation issue of Syiqāq and continuous conflict as a reason for divorce, the unsynchronized regulation affects the practice of handling divorce cases on the grounds of Syiqāq in the Religious Court.

In Article 19 letter f Government Regulation No 9 2019 jo Article 116 letter f KHI, it is determined, that one of the reasons for divorce is "between husband and wife there are constant disputes and conflict and there is no hope of living well in the household" The reason for this divorce is simply understood as Syiqāq in Islamic law, which then in its handling applies the provisions of Article 76 of Law No. 1 of 1989 on Religious Court determined by the following:

1. If the divorce lawsuit is based on Syiqāq, the testimony of witnesses from families or people close to the husband and wife must be heard to obtain a divorce verdict.
2. After hearing the witnesses testimony about the nature of the dispute between the husband and wife, they may appoint one or more of the families of each party or other to be hakam.

In reality, in the course of further development, there is an opinion that in essence "separates" Syiqāq and the continuous conflict as the reason for divorce, this opinion is then legitimized into Book II Bindalmin which is enforced based on the Supreme Court Chief of Republic Indonesia Decree number: KMA/032/SK/IV/2006 in letter b is determined as follows: "The claim on the grounds of the Syiqāq must be made from the beginning of the conflict is a matter of the Syiqāq, not from the divorces case that basis of continuous friction which is then made into a matter of Syiqāq."

Theoretically and practically the regulations in Book II Bindalmin which is between the continuous conflict is loaded with many law problems. the review of various approaches and theories of analysis, namely through the approach of interpretation of the Qur'an and fiqh, through the theory of mashlahat, the theory of sharia maqashid, and the theory of legal synchronization, the separation is not accurate and results in unsynchronized practice of legal handling divorce cases on the grounds of constant conflicts. Therefore, to solve the legal problem, the provisions in Book II Bindalmin must be reviewed and reconstructed.

## الخلاصة

أحمد فرحات، رقم هوية الطالب: ٦١٠٠٢٢٠١١٣٠٧١، تفكيك تسوية قضايا الطلاق لأسباب قانونية في المحاكم الشرعية  
الكلمات الرئيسية: تسوية قضية السقاق الدعاوى القضائية في المحاكم الدينية حصل على درجة الدكتوراه في الدراسات العليا في جامعة ولاية أنتساري، بانجراماسين ٢٠٢٢  
تعد هذه الأطروحة بحثًا قانونيًا معياريًا، وقد تم إجراء البحث من خلال فحص ودراسة عدد من المواد القانونية أو الوثائق القانونية في شكل قرارات المحاكم الدينية، والأنظمة القانونية، والكتب والمؤلفات العلمية والمؤلفات المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة.  
يبدأ هذا البحث بالقواعد غير المتزامنة التي تحكم المشاكل الزوجية والمشاجرات المستمرة كأسباب للطلاق، وللقواعد غير المتزامنة أثر في ممارسة التعامل مع قضايا الطلاق المبني على الشجار في المحاكم الشرعية.

في المادة ٩١ و اللائحة الحكومية رقم ٩ لعام ٥٧٩١ بالتزامن مع المادة ٦١١ حرف و من مجموعة الشريعة الإسلامية، تقرر أن أحد أسباب الطلاق هو "تستمر الخلافات والمشاجرات بين الزوج والزوجة ولا يوجد أمل في العيش في وئام في المنزل مرة أخرى"  
ولذلك فإن سبب الطلاق يُفهم ببساطة على أنه خلاف في الشريعة الإسلامية  
وتم بعد ذلك تطبيق أحكام المادة ٦٧ من القانون رقم ١ لسنة ٩٨٩١ بشأن المحاكم الشرعية في التعامل مع هذه القضية، والتي تنظم ما يلي

١. إذا كانت دعوى الطلاق مبنية على أسباب زواجية، فيجب للحصول على قرار الطلاق سماع شهادة الشهود من الأسرة أو الأشخاص المقربين من الزوج والزوجة  
٢. بعد سماع الشهود بشأن طبيعة الخلاف بين الزوج والزوجة، يجوز للمحكمة تعيين شخص أو أكثر من أسرة كل طرف أو أشخاص آخرين للعمل كقضاة  
ومن الناحية العملية، لا يشكل هذا الحكم أي مشكلة نسبية.

ومع ذلك، وفي سياق مزيد من التطوير، نشأ رأي "يفصل" الشقاق عن الخلافات المستمرة كسبب للطلاق، ثم تم شرعنة هذا الرأي في دليل تنفيذ واجبات وإجراءات عمل المحاكم الشرعية

والذي يتم تنفيذه بناءً على مرسوم رئيس المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا يتم تحديدها على النحو التالي:

"الدعوى يجب أن ترفع بسبب نزاع، فالدعوى في البداية هي دعوى نزاع، وليست تغييرا عن دعوى طلاق مبنية على مشاجرات مستمرة، ثم تصبح بعد ذلك دعوى نزاع"  
من الناحية النظرية والعملية، فإن الترتيب في الكتاب الثاني، الحرف ب، يفرق بين النزاع الدائر والسياق مليء بالنقاش القانوني. وإذا نظرنا إلى المناهج والنظريات التحليلية المختلفة، خاصة من خلال تفسير القرآن والفقه، من خلال نظرية المشالحات، ونظرية الموضوعية القانونية، ونظرية التزام القانوني، فإن هذا الفصل غير مناسب ويؤدي إلى عدم

الفهم. التزامن في الممارسة القانونية للتعامل مع الطلاق. القضية بسبب الحجج المستمرة .  
لذلك، ولعلاج هذه الإشكالية القانونية لا بد من مراجعة الأحكام الواردة في الكتاب الثاني،  
الرسالة ب، وإجراء دراسة قانونية لها

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	te dan es
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha kecil
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Sh	es dan ha
ض	dad	Dh	de dan ha
ط	tha'	Tha	te dan ha
ظ	zha'	Zh	zet dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	Ge dan ha
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	ha besar
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-quddus</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

## IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	a
ـِ	Kasrah	Ditulis	i
ـُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرا	Kasrah	Ditulis	quri'a

ينطق	Dammah	Ditulis	yanthiqu
------	--------	---------	----------

### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	Ā kāmilah
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	Ā shallā
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	Ī syadīd
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	Ū shudūr

### VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au wa fir'auna dzī al-autād

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
---------------	---------	-------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	Al-Qur'an
الكتاب	Ditulis	Al-kitab

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di-idgamkan

الصبح	Ditulis	ash-shubhu
المساهرة	Ditulis	as-sāhirah



### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Idza asy-syamsu</i>

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Kajian teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	32
I. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II KETENTUAN MENGENAI <i>SYIQAQ</i> , PERSELISIHAN DAN	
PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.....	42
A. Ketentuan <i>Syiqāq</i> .....	42
B. Kedudukan Saksi dari Keluarga Suami Istri dalam perkara <i>Syiqāq</i> .....	54
C. Penunjukkan <i>Hakamain</i> dalam perkara <i>Syiqāq</i> .....	59
D. Ketentuan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Gugat Cerai dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus <i>Syiqāq</i> .....	83

BAB III PROBLEMATIKA PENGATURAN <i>SYIQĀQ</i> SEBAGAI ALASAN	
PERCERAIAN .....	105
A. Pengaturan <i>Syiqāq</i> Sebagai Alasan Perceraian.....	105
B. Problematika Pengaturan <i>Syiqāq</i> Sebagai Alasan Perceraian	
dalam perkara <i>Syiqāq</i> .....	153
BAB IV KASUS <i>SYIQĀQ</i> DI PENGADILAN AGAMA.....	165
A. Gambaran Kasus.....	165
B. Analisis Kasus Perkasus.....	216
C. Analisis Umum.....	235
BAB V DEKONSTRUKSI KETENTUAN HUKUM PENYELESAIAN	
PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN <i>SYIQĀQ</i> .....	243
A. Tinjauan Hukum Pemisahan Perselisihan dan Pertengakaran	
menjadi <i>syiqāq</i> dan bukan <i>syiqāq</i> .....	244
B. Dekonstruksi Pengaturan Penangan Perkara Gugat Cerai	
dengan Alasan <i>Syiqāq</i> di Pengadilan Agama.....	280
BAB VI PENUTUP.....	294
A. Kesimpulan.....	294
B. Saran.....	296
DAFTAR PUSTAKA .....	298
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	319